



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 27 Maret 2022/Periodik - 2021)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : KEMENTERIAN INVESTASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL (BKPM)  
**UNIT KERJA** : SEKRETARIAT UTAMA

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : **INDRA DARMAWAN**
2. Jabatan : **STAF AHLI BIDANG EKONOMI MAKRO**
3. NHK : **164084**

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN** **Rp. 12.868.636.270**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 420 m2/300 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HIBAH TANPA AKTA Rp. 2.295.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 310 m2/250 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , WARISAN Rp. 1.958.450.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 1188 m2/475 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , WARISAN Rp. 3.111.544.000
4. Bangunan Seluas 100 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 995.642.270
5. Tanah Seluas 375 m2 di NEGARA [unknown], WARISAN Rp. 882.000.000
6. Bangunan Seluas 27 m2 di KAB / KOTA BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp. 550.000.000
7. Bangunan Seluas 115 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000.000
8. Tanah Seluas 3800 m2 di KAB / KOTA SUKABUMI, WARISAN Rp. 76.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** **Rp. 704.000.000**

1. MOBIL, HONDA HRV Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 284.000.000
2. MOBIL, TOYOTA FORTUNER VRZ Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 420.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** **Rp. 150.000.000**



D. SURAT BERHARGA	Rp.	12.200.000.000
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	2.104.403.037
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	28.027.039.307
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	28.027.039.307

## Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.